



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 08 Februari 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pengawasan Program Bansos Tahun 2022
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 48 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si didampingi Ketua Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda **“Pengawasan Program Bansos Tahun 2022 dan Isu-isu Aktual”** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial TA 2022 sebesar Rp91.884.679.114.935,- (*Sembilan Puluh Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 98,71 persen dari Pagu Anggaran Bansos sebesar Rp93.086.716.563.000,- (*Sembilan Puluh Tiga Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Sosial Tahun 2021 yang dibukukan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2021, serta raihan penghargaan-penghargaan lainnya.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan Menteri Sosial RI untuk mendorong Kementerian Keuangan RI untuk membuka blokir anggaran di awal tahun agar memperlancar proses penyaluran bansos.
4. Komisi VIII DPR RI mendukung *cleansing data* untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para penerima manfaat dengan kuota sebanyak 111.400.000 jiwa sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
5. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Sosial RI untuk melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial melalui bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himbara dengan memegang kendali (*dashboard*) penyaluran bansos di tangan Kementerian Sosial RI. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan mengagendakan rapat khusus dengan Himbara terkait dengan penyaluran bantuan sosial.
6. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Program e-warong perlu dievaluasi karena menjadi “bancakan” oknum-oknum yang memanfaatkan dana bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
- b. Meningkatkan program pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan perlu ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan agar KPM dapat lebih berdaya secara sosial dan ekonomi.
- c. Melakukan evaluasi terhadap para tenaga pendamping dan mempertimbangkan rasio jumlah KPM untuk setiap SDM PKH.
- d. Perlunya regulasi baru untuk mempercepat proses pembaharuan DTKS dalam rentang satu bulan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si